

Strategi Implementasi Kebijakan Mutu Pendidikan PAUD dalam Konteks Akreditasi Nasional

Anugraheni, Muthia^{1*}, Rohman, Arif¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author. e-mail: muthiudara.2023@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mutu pendidikan yang diterapkan di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I Sleman dalam pemenuhan standar akreditasi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal, yaitu perumusan kebijakan mutu pendidikan, proses implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, serta asesor akreditasi yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan TK Among Siwi relatif lebih konsisten dalam memenuhi indikator standar karena ditopang koordinasi yang solid, komunikasi intensif, dan disposisi guru yang positif, TK Dharma Bakti I menghadapi keterbatasan pada aspek sarana prasarana, birokrasi internal, dan beban administratif. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan mutu PAUD sangat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal serta kemampuan lembaga dalam mengelola keterbatasan sebagai peluang perbaikan.

Kata kunci: kebijakan mutu pendidikan, PAUD, akreditasi, standar nasional pendidikan

Abstract

This study aims to analyse the education quality policies implemented at Among Siwi Kindergarten and Dharma Bakti I Kindergarten in Sleman in meeting accreditation standards. The research focuses on three things, namely the formulation of education quality policies, the implementation process, and the supporting and inhibiting factors that influence the success of the policies. The research approach uses a qualitative method with a case study design. The research subjects consist of the principal, teachers, and accreditation assessors who were determined through purposive sampling techniques. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation study. To ensure data validity, source, technique, and time triangulation techniques were used. The results of the study indicate Among Siwi Kindergarten is relatively more consistent in meeting standard indicators because it is supported by solid coordination, intensive communication, and positive teacher disposition, Dharma Bakti I Kindergarten faces limitations in terms of infrastructure, internal bureaucracy, and administrative burden. , this study confirms that the successful implementation of PAUD quality policies is largely determined by a combination of internal and external factors and the institution's ability to manage limitations as opportunities for improvement.

Keywords: education quality policy, early childhood education, accreditation, national education standards



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Mutu pendidikan senantiasa dipandang sebagai fondasi strategis yang menentukan arah pembangunan bangsa, sebab kualitas sumber daya manusia pada hakikatnya ditopang oleh sistem pendidikan yang terjamin mutunya. Pada konteks pendidikan anak usia dini (PAUD), kondisi di Indonesia masih menyimpan sejumlah problematika mendasar yang patut mendapat perhatian serius. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di banyak lembaga PAUD menjadi faktor pertama yang cukup krusial, karena infrastruktur yang tidak memadai akan berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas layanan pembelajaran (Fithri & Anggraini, 2018). Selain itu, hasil akreditasi yang semestinya dijadikan tolok ukur perbaikan lembaga sering kali tidak ditindaklanjuti secara konsisten oleh pemerintah daerah, sehingga lembaga pendidikan kehilangan arah dalam upaya meningkatkan kualitasnya (Busron & Rachmi, 2020).

Di sisi lain, kompetensi tenaga pendidik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun mutu pendidikan anak usia dini juga masih terbatas. Rendahnya kapasitas guru tidak hanya terkait dengan keterampilan pedagogis, tetapi juga mencakup minimnya kesempatan untuk memperoleh pelatihan berkelanjutan serta rendahnya dukungan institusional (Rumi & Mufti, 2024). Kompleksitas persoalan ini semakin diperburuk oleh rendahnya angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Indonesia, yang meskipun menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, masih jauh primitif jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Padahal, periode usia dini dikenal sebagai fase emas (*golden age*) perkembangan manusia, di mana setiap stimulasi yang diberikan akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif, afektif, sosial, emosional, hingga moral anak (Bahri, 2021).

Urgensi penelitian ini berpijak pada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa lembaga taman kanak-kanak (TK) tidak berhenti pada sekadar memenuhi indikator formal yang tercantum dalam *Standar Nasional Pendidikan* (SNP), melainkan juga mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial, relevan dengan perkembangan kebutuhan peserta didik, serta memiliki daya saing di tengah kompetisi global. Lebih dari itu, keberlanjutan mutu pendidikan pada jenjang TK menjadi sangat penting karena kualitas pendidikan anak usia dini akan menentukan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya, sekaligus menjadi cerminan arah ekspansi sumber daya manusia di masa depan.

Dalam situasi tersebut, keberadaan prosedur legalisasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD PNF) sejak tahun 2008 sejatinya berfungsi sebagai instrumen strategis, tidak hanya untuk menilai kelayakan lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme jaminan mutu yang diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan di satuan pendidikan (Goetsch & Davis, 2014). Akreditasi diharapkan dapat berfungsi sebagai tolok ukur objektif yang memperlihatkan sejauh mana lembaga pendidikan telah memenuhi standar pelayanan minimal serta komitmen terhadap peningkatan kualitas.

Namun demikian, praktik implementasi akreditasi di lapangan tidak jarang menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut terutama muncul dalam bentuk keterbatasan teknis, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta kendala manajerial yang meliputi lemahnya kepemimpinan, perencanaan strategis, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan mutu. Akibatnya, fungsi akreditasi yang seharusnya menjadi motor penggerak peningkatan mutu sering kali belum optimal dijalankan, sehingga capaian akreditasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengurai permasalahan sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan yang lebih aplikatif bagi penguatan mutu pendidikan TK.

Sebagai salah satu alternatif solusi untuk menjawab problematika mutu pendidikan anak usia dini, dibutuhkan suatu kajian empiris yang berfokus pada kebijakan mutu pendidikan di tingkat satuan PAUD. Kajian semacam ini penting karena mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks riil yang dihadapi lembaga, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, kecukupan sarana prasarana, hingga pola manajemen kelembagaan. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk mengungkap praktik kebijakan secara faktual, termasuk dinamika, tantangan, serta strategi yang dijalankan oleh sekolah dalam memenuhi standar mutu. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya

sekadar membahas konsep normatif kebijakan, tetapi juga berusaha memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dijalankan dalam keseharian.

Dalam kerangka itu, penelaahan praktik di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I dipandang signifikan. Kedua lembaga ini menampilkan dinamika capaian akreditasi yang berbeda: TK Among Siwi sempat berada pada akreditasi B sebelum akhirnya mampu naik ke akreditasi A, sedangkan TK Dharma Bakti I pernah mengalami penurunan dari akreditasi A ke B, sebelum kembali memperoleh akreditasi A. Perbedaan perjalanan akreditasi tersebut menunjukkan adanya variasi strategi, manajemen, serta kebijakan mutu yang diterapkan oleh masing-masing lembaga. Hal ini menjadi bahan refleksi berharga untuk menelusuri faktor-faktor kunci yang mendukung maupun menghambat pencapaian standar mutu yang diharapkan.

Melalui penggalian pengalaman kedua TK tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan suatu model kebijakan mutu pendidikan yang bersifat aplikatif dan dapat direplikasi oleh satuan PAUD lain. Model tersebut harus berbasis pada konteks lokal agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta keterbatasan lingkungan masing-masing lembaga, tetapi pada saat yang sama tetap berorientasi pada regulasi nasional agar tidak kehilangan arah kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini bukan hanya menawarkan rekomendasi yang bersifat teoritis, tetapi juga solusi praktis yang mampu menjembatani kesenjangan antara standar kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi faktual di lapangan.

Tujuan utama penelitian adalah: (1) menganalisis kebijakan mutu pendidikan yang diterapkan di kedua TK dalam memenuhi standar akreditasi; (2) mengkaji proses pembentukan kebijakan mutu; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan kebijakan mutu. Kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Selaku teoritis, hasil penelitian memperbanyak literatur kebijakan pendidikan anak usia dini, khususnya terkait implementasi akreditasi. Selaku praktis, penelitian ini memberi masukan bagi pemerintah daerah, tim akreditasi, dan lembaga PAUD dalam merancang strategi peningkatan mutu yang lebih efektif, serta membantu orang tua dalam memilah layanan pendidikan yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih karena dianggap paling tepat untuk menggali secara mendalam kebijakan mutu pendidikan di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I dalam kaitannya dengan pemenuhan standar akreditasi. Desain studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh gambaran utuh mengenai dinamika yang terjadi dalam konteks nyata, sehingga tidak hanya berhenti pada pencapaian akreditasi sebagai formalitas administratif, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan mutu dirumuskan, dijalankan, serta dievaluasi dalam praktik keseharian lembaga pendidikan. Pendekatan kualitatif juga memfasilitasi peneliti untuk masuk ke dalam pengalaman subjektif para informan, sehingga makna, persepsi, serta strategi yang digunakan dapat dipahami secara lebih kaya dan mendalam (Creswell, 2013; Moleong, 2017).

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024/2025, dengan tempat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada dua lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposif dengan alasan estimasi bahwa kedua lembaga memiliki dinamika yang berbeda dalam hal akreditasi, sehingga dapat memberikan data yang komprehensif mengenai variasi implementasi kebijakan mutu pendidikan di tingkat TK. Subjek penelitian ditentukan memakai teknik purposive sampling, di mana informan ditetapkan secara sengaja berdasarkan parameter tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama terdiri atas kepala sekolah, guru, dan asesor akreditasi, sebab mereka memiliki posisi strategis dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan mutu pendidikan.

Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan yang saling melengkapi, yaitu observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi. Observasi dikerjakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai suasana dan praktik implementasi kebijakan mutu di sekolah, baik dalam aspek manajerial maupun pembelajaran. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pandangan, pengalaman, serta

strategi yang digunakan para informan, sembari tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk munculnya tema-tema baru dari lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilihat terhadap berbagai arsip resmi lembaga seperti profil sekolah, visi dan misi, kurikulum, rencana kerja tahunan, hingga laporan akreditasi, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari narasi informan, tetapi juga dari bukti administratif dan dokumen tertulis yang sah (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri berfungsi sebagai instrumen utama, karena keberhasilan pengumpulan dan analisis data sangat ditentukan oleh sensitivitas, keterampilan komunikasi, serta kemampuan peneliti dalam membaca situasi di lapangan. Untuk menunjang fungsi tersebut, peneliti melengkapi diri dengan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen, yang berfungsi sebagai panduan agar proses penelitian berjalan lebih sistematis.

Proses analisis data pada penelitian ini dilaksanakan secara terus-menerus sejak tahap awal hingga akhir dengan memanfaatkan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model tersebut mencakup tiga elemen pokok, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan sekaligus verifikasi kesimpulan. Tahap kondensasi dilakukan melalui pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terorganisasi kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, matriks, maupun tabel tematik agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menghubungkan hasil temuan di lapangan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, sembari memastikan konsistensi data melalui proses verifikasi berulang.

Upaya untuk menjamin keabsahan temuan dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi yang mencakup sumber, teknik, serta waktu, sehingga data yang terkumpul dapat saling diuji, dipadukan, dan dibandingkan dari beragam perspektif. Selain itu, peneliti mengacu pada empat kriteria utama dalam penilaian keabsahan data kualitatif, yakni kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln & Guba (1985). Penerapan strategi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat validitas serta kedalaman interpretasi data, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi kontekstual yang tinggi, mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan mutu pendidikan anak usia dini, serta menyumbangkan pemikiran akademis yang signifikan bagi pengembangan wacana dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian yang dilakukan di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I Sleman (23 Januari–28 Februari 2025) menyoroti kebijakan mutu pendidikan dalam memenuhi standar akreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah memiliki karakteristik dan dinamika berbeda, namun sama-sama berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebijakan mutu yang diterapkan di masing-masing TK mencerminkan upaya sekolah dalam memastikan proses pembelajaran yang efektif serta layanan pendidikan yang setakar dengan keperluan peserta didik dan harapan stakeholder. Dalam hal ini, kepala sekolah berkedudukan substansial dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik melalui pengelolaan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana, maupun pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Adapun peta konsep yang menggambarkan antara komponen utama dalam pelaksanaan kebijakan mutu pendidikan di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I yaitu meliputi peran kepala sekolah, guru, sarana prasarana, orang tua, dan kerjasama eksternal yang saling berinteraksi untuk memenuhi standar akreditasi.



Gambar 1. Peta Konsep

Pertama, kebijakan mutu pendidikan di TK Among Siwi maupun TK Dharma Bakti I diarahkan secara strategis untuk mencapai standar akreditasi yang ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Upaya ini dilakukan dengan memakai sumber daya yang tersuguh di masing-masing sekolah, memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, serta menjalin kerja sama erat dengan dinas pendidikan, masyarakat, dan komite sekolah. Kepala TK Among Siwi menegaskan, *“Kami selalu menyesuaikan program sekolah dengan indikator akreditasi, karena itu menjadi tolok ukur mutu yang harus dicapai”*. TK Among Siwi relatif lebih konsisten dalam memenuhi indikator-indikator standar, baik dalam aspek manajemen, pembelajaran, maupun sarana prasarana. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan yang visioner, pola komunikasi yang baik, dan keterlibatan guru yang aktif, sebagaimana disampaikan seorang guru, *“Setiap rapat kami bahas capaian standar, jadi semua guru tahu apa yang harus diperbaiki”*.

Sebaliknya, TK Dharma Bakti I menghadapi kendala serius pada aspek sarana prasarana dan manajemen internal. Kepala sekolah mengakui, *“Kami masih kekurangan ruang kelas dan fasilitas belajar, sehingga sulit untuk memenuhi semua indikator dengan maksimal”*. Kendati demikian, sekolah ini tetap menunjukkan komitmen terhadap peningkatan mutu melalui pemanfaatan sumber daya yang ada serta langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Salah seorang guru menyampaikan, *“Walaupun terbatas, kami tetap berusaha menyesuaikan dokumen dan kegiatan agar sesuai standar akreditasi”*. Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kondisi, kedua lembaga tetap memiliki orientasi yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui pencapaian standar akreditasi.

Kedua, pembentukan kebijakan mutu pendidikan di kedua lembaga dilaksanakan melalui proses partisipatif, melibatkan kepala sekolah, guru, komite, dan stakeholder terkait. Kepala TK Among Siwi menegaskan, *“Kebijakan mutu yang kami jalankan bukan hanya dari kepala sekolah, tapi hasil musyawarah bersama guru dan komite supaya sesuai dengan kondisi nyata sekolah”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirumuskan secara top-down semata, melainkan lahir dari diskusi kolektif untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi sekolah, seperti keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan tenaga pendidik, serta kebutuhan mendesak akan fasilitas belajar.

Implementasi kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk program nyata. Seorang guru di TK Dharma Bakti I menyampaikan, *“Kami pernah mengikuti pelatihan guru, hasilnya langsung kami terapkan di kelas supaya pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan anak”*. Di sisi lain, kepala sekolah menambahkan, *“Setiap semester kami adakan rapat evaluasi, supaya program yang sudah jalan bisa diperbaiki kalau ada kekurangan”*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mutu tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar diinternalisasikan dalam praktik pengelolaan maupun pembelajaran sehari-hari melalui pelatihan guru, penguatan layanan berbasis kebutuhan anak, serta evaluasi rutin.

Ketiga, penelitian menemukan adanya faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan mutu, yakni komunikasi yang baik antaraktor sekolah, sikap positif dan dedikasi guru,

keterlibatan masyarakat dalam mendukung program sekolah, serta kepemimpinan kepala sekolah yang berperan sebagai motor penggerak. Seorang guru di TK Among Siwi menuturkan, *“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, sehingga setiap masalah bisa cepat diatasi bersama”*. Hal senada disampaikan komite sekolah, *“Orang tua ikut membantu, baik lewat dana maupun tenaga, karena kami ingin sekolah ini terus maju dan bisa terakreditasi dengan baik”*. Kutipan-kutipan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan komunikasi internal dan partisipasi eksternal menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif untuk mencapai standar akreditasi.

Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan adanya faktor penghambat yang cukup signifikan. Kepala TK Dharma Bakti I mengakui, *“Kami masih kekurangan guru dan fasilitas, sementara beban administrasi juga cukup berat, jadi sulit untuk fokus sepenuhnya ke mutu”*. Sementara itu, seorang guru menambahkan, *“Sebagian rekan masih menganggap akreditasi itu hanya beban administrasi, jadi kurang semangat dalam menyiapkan dokumen”*. Selain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan waktu, struktur birokrasi sekolah termasuk peran komite dinilai belum sepenuhnya optimal dalam mendukung implementasi kebijakan mutu secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara faktor pendukung yang cukup kuat dengan hambatan struktural dan kultural yang masih perlu diatasi.

Pembahasan

Hasil penelitian ini membahas bahwa kebijakan mutu pendidikan di TK Among Siwi maupun TK Dharma Bakti I telah diarahkan secara strategis untuk mengkover standar akreditasi yang diputuskan oleh Badan Akreditasi Nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedua sekolah telah merumuskan arah kebijakan dengan mengacu pada Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai tolok ukur utama mutu. Kondisi tersebut konsisten dengan temuan Lamatolo, Waris, dan Alamsyah (2023) yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan tujuan akreditasi menjadi penentu utama kemakbulan pengamalan kebijakan PAUD. Van Meter dan Van Horn juga menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan terukur agar implementasi kebijakan dapat berjalan konsisten. Oleh karena itu, seharusnya sekolah tidak hanya menyusun dokumen standar, tetapi juga mengoperasionalkan tujuan tersebut dalam bentuk indikator capaian yang terukur dan mudah dipahami oleh guru maupun stakeholder sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan (Nugroho, 2017; Lamatolo et al., 2023).

Dari sisi sumber daya, penelitian menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua lembaga. TK Among Siwi memiliki dukungan sumber daya yang relatif memadai, baik dari segi jumlah guru, fasilitas pembelajaran, maupun kepemimpinan kepala sekolah, sehingga pelaksanaan kebijakan mutu lebih konsisten. Sebaliknya, TK Dharma Bakti I menghadapi keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas yang belum memadai, serta beban administratif guru yang tinggi, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan mutu. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ariwibowo, Sholeh, Kristanto, Roesminingsih, dan Hariyati (2024) yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan pelatihan yang berkelanjutan sangat menentukan mutu PAUD. Tilaar (2004) bahkan menyebut keterbatasan sumber daya sebagai hambatan klasik dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, seharusnya pemerintah daerah maupun yayasan menyediakan alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk perbaikan sarana minimum, pelatihan guru secara terstruktur, serta pendampingan teknis agar lembaga yang mengalami keterbatasan tidak tertinggal dalam memenuhi standar akreditasi (Ariwibowo et al., 2024).

Dari sisi struktur organisasi dan karakteristik lembaga, penelitian menunjukkan bahwa TK Among Siwi memiliki sistem koordinasi internal yang solid dengan pembagian tugas yang jelas, sedangkan TK Dharma Bakti I masih menghadapi birokrasi internal yang kaku sehingga koordinasi antar guru belum optimal. Edward III menegaskan bahwa struktur organisasi yang terlalu birokratis dapat menghambat fleksibilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, seharusnya lembaga PAUD mengadopsi struktur yang lebih adaptif dengan desentralisasi tanggung jawab, misalnya menunjuk koordinator mutu yang khusus menangani akreditasi, serta menyusun SOP sederhana untuk memastikan setiap guru memahami perannya dalam peningkatan mutu (Nugroho, 2017).

Komunikasi antaraktor juga menjadi pembeda yang signifikan. TK Among Siwi secara rutin mengadakan rapat evaluasi mutu yang memungkinkan setiap guru mengetahui perkembangan indikator akreditasi, sementara komunikasi di TK Dharma Bakti I masih berlangsung tidak konsisten sehingga beberapa kebijakan mutu tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Khoirunnisa, Alfiah, Ningrum, dan Pangestu (2025) yang membuktikan bahwa komunikasi organisasi dan kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja guru dan pencapaian sekolah. Van Meter dan Van Horn juga menegaskan bahwa keteraturan aliran informasi antaraktor kebijakan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi. Seharusnya, sekolah menerapkan protokol komunikasi formal melalui rapat terjadwal, notulensi yang terdokumentasi, dan pemanfaatan media digital sederhana untuk distribusi informasi sehingga koordinasi dapat lebih terarah dan konsisten (Nugroho, 2017).

Selain itu, penelitian mengidentifikasi perbedaan disposisi pelaksana kebijakan. Guru-guru di TK Among Siwi menunjukkan sikap positif dengan memandang akreditasi sebagai peluang untuk perbaikan mutu, sedangkan sebagian guru di TK Dharma Bakti I masih menilai akreditasi sebagai beban administratif semata. Hal ini memperkuat pandangan Edward III (Nugroho, 2017) bahwa sikap dan motivasi pelaksana merupakan faktor paling menentukan dalam implementasi kebijakan. Seharusnya, lembaga maupun pemerintah melakukan reframing akreditasi sebagai sarana pembinaan mutu berkelanjutan, bukan sekadar penilaian administratif. Goetsch dan Davis menekankan bahwa akreditasi mestinya diposisikan sebagai instrumen manajemen mutu total, yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi insentif, coaching, dan pengakuan profesional perlu dilakukan untuk membangun komitmen guru dalam implementasi kebijakan mutu (Goetsch & Davis, 2014).

Faktor lain yang turut mendukung adalah keterlibatan masyarakat dan komite sekolah. Di TK Among Siwi, dukungan orang tua dan komite tampak aktif dalam menyediakan bantuan dana maupun tenaga, sementara di TK Dharma Bakti I peran komite belum optimal. Penelitian Muis menunjukkan bahwa supervisi akreditasi yang melibatkan stakeholder lokal dapat memperkuat kesinambungan mutu PAUD. Hasbullah juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen esensial dalam menjamin keberhasilan kebijakan pendidikan. Seharusnya, peran komite sekolah tidak hanya terbatas pada urusan dana, tetapi juga difungsikan dalam forum evaluasi, monitoring, dan penyusunan rencana kerja mutu agar lebih partisipatif dan berkelanjutan (Muis, 2022; Hasbullah, 2015).

Akhirnya, hambatan berupa beban administrasi guru juga muncul dalam penelitian ini. Guru di TK Dharma Bakti I mengaku kesulitan membagi waktu antara menyiapkan dokumen akreditasi dengan fokus pembelajaran. Rosmiati, Zakaria, Mauliana, dan Suhartati (2024) menekankan bahwa kesiapan digitalisasi administrasi dan dukungan tenaga administrasi tambahan dapat meringankan beban guru sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah daerah maupun yayasan mendorong penggunaan sistem digital sederhana dalam manajemen akreditasi, misalnya template dokumen online dan penyimpanan berbasis cloud, agar beban guru dapat diminimalkan sehingga mereka dapat lebih fokus pada peningkatan layanan pembelajaran (Rosmiati et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan mutu pendidikan di TK Among Siwi dan TK Dharma Bakti I diarahkan secara strategis untuk memenuhi standar akreditasi melalui pemanfaatan sumber daya, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, serta pelibatan guru, komite, dan masyarakat. Temuan lapangan memperlihatkan adanya variasi implementasi: TK Among Siwi relatif konsisten memenuhi indikator standar karena ditopang koordinasi yang solid, komunikasi yang intensif, dan disposisi guru yang positif, sedangkan TK Dharma Bakti I menghadapi kendala signifikan pada aspek sarana prasarana, birokrasi internal, serta beban administratif, meski tetap menunjukkan komitmen pada peningkatan mutu. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan visioner, komunikasi efektif, partisipasi orang tua, serta sikap proaktif guru, sementara hambatan yang muncul mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, dan persepsi negatif terhadap akreditasi. Secara umum, hasil penelitian menggeneralisasi bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan mutu PAUD sangat ditentukan oleh kombinasi faktor internal (kepemimpinan, disposisi, komunikasi, dan koordinasi) dan eksternal (dukungan stakeholder dan regulasi), serta kemampuan lembaga untuk mengelola keterbatasan menjadi peluang perbaikan.

Berdasarkan temuan itu, terdapat beberapa implikasi yang dapat diajukan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan dengan menunjukkan bahwa model implementasi Van Meter dan Van Horn serta Edward III masih relevan diterapkan pada konteks PAUD, namun perlu dilengkapi dengan perspektif partisipasi masyarakat dan manajemen mutu berkelanjutan. Secara praktis, disarankan agar lembaga PAUD memperkuat sistem komunikasi internal, mendesain struktur organisasi yang adaptif, serta membangun budaya mutu yang memandang akreditasi bukan sekadar beban administratif, tetapi sebagai instrumen pembelajaran institusional. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah dan BAN PAUD PNF perlu menyediakan mekanisme pendampingan pasca-akreditasi, digitalisasi manajemen dokumen, serta insentif untuk guru agar motivasi dalam implementasi mutu lebih terjaga. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar kajian diperluas pada lebih banyak lembaga PAUD di berbagai daerah dengan pendekatan komparatif, serta menambahkan dimensi kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif pengaruh faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap capaian mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2023). Analisis Evaluasi Hasil Akreditasi Paud Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Idarah*, 2(1), 49–55.
- Astutik, A. P., & Farista, R. (2023). Respon Kebijakan Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam.
- Ariwibowo, A., Sholeh, M., Kristanto, A., Roesminingsih, E., & Hariyati, N. (2024). Manajemen sumber daya manusia pada pendidikan anak usia dini di Kabupaten Magetan. *Journal of Education Research*. Diambil dari <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1048>
- Bahri, Syamsul, N. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Dalam Stabilitas Mutu Pembelajaran Anak Usia Dini Era Pandemi Disease. *Continuous Education: Journal of Science and* <https://doi.org/10.51178/ce.v2i2.224>
- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v1i1i2.2335>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Pulblik-Gadjah Mada University Press.
- Donkoh, R., Lee, W. O., Ahoto, A. T., Donkor, J., Twerefoo, P. O., Akotey, M. K., & Ntim, S. Y. (2023). Effects of educational management on quality education in rural and urban primary schools in Ghana. *Heliyon*, 9(11), e21325. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21325>
- Fithri, R., & Anggraini, W. (2018). Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(01), 1–15. <https://doi.org/10.31849/paudlectura.v2i01.1982>
- Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2014). *Quality management for organizational excellence* (7th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Iwan Sanusi. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan (Hakikat, Pendekatan, Strategi, Model, Tahapan, dan Faktor yang Memengaruhi). *Idarotuna: Jurnal Manajemen Pendidikan* <https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i1.3823>
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Khoirunnisa, K., Alfiah, S., Ningrum, A. P., & Pangestu, V. F. (2025). The influence of leadership, management, organizational communication, work environment, and teacher involvement on students' school performance. *Educational Leadership and Management Journal*. Diambil dari <https://online-journal.unja.ac.id/element/article/view/40685>
- Kurniawan, D. (2020). Analisis Pemenuhan Standar Proses, Standar Sarana Dan Prasarana Dan Standar Pengelolaan Di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kotaraja Kota Jayapura. *Noken : Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.31957/noken.v1i1.1278>
- Lamatolo, A., Waris, I., & Alamsyah, M. N. (2023). Implementasi kebijakan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini di Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*. Diambil dari <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/676>
- Lee, J. Y., & Sung, J. (2023). Effects of in-service programs on childcare teachers' interaction quality: A meta-analysis. *Teaching and Teacher Education*, 124, 104017. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104017>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muis, A. M. (2022). Supervisi akreditasi dalam pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF di Jawa Barat. *Educate: Jurnal Teknologi Pendidikan*. Diambil dari <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/EDUCATE/article/view/6365>
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rumi, M. H. A., & Mufti, M. I. (2024). Implementasi Kebijakan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Sigi Tahun 2017-2022. 1(2). <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i2.1463>
- Rosmiati, R., Zakaria, U. I., Mauliana, L., & Suhartati. (2024). Siapkah sekolah penggerak PAUD menerapkan Kurikulum Nasional 2025? *Journal of Education Research*. Diambil dari <https://jer.or.id/index.php/jer/article/view/1108>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.